

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN PASAR UMUM

(Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Penetapan Pasar Raya Sebagai
Pasar Umum Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

KK
FD AN 28/04
Ari
P



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Disusun Oleh :

FANDA ARISMITA

079514770

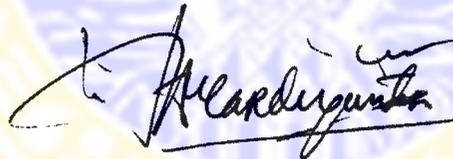
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
SEMESTER GENAP 2002 / 2003**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setuju untuk diujikan

Surabaya, 20 Juni 2003

Dosen Pembimbing



Drs. Antun Mardiyanta, MA
NIP. 131 801 404

ABSTRAKSI

Fokus penelitian ini adalah pada proses perumusan kebijakan tentang penetapan Pasar Raya sebagai pasar umum di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, serta sampai sejauh mana keterlibatan target group / pedagang dalam proses tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh fenomena empiris yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak berhasil melaksanakan SK Bupati No. 282 Tahun 1998, terutama Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : 'Keberadaan Pasar Pertiwi di Kelurahan Sawahan Kecamatan Mojosari dinyatakan ditutup". Hal ini dibuktikan dengan masih berdirinya Pasar Pertiwi dan adanya preferensi sebagian pedagang untuk tetap berjualan di pasar tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskripsi, yang bermaksud menggambarkan secara mendalam suatu gejala/fenomena. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi serta penggunaan dokumen sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif karena data-data yang ada sebagian besar merupakan hasil wawancara. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan berpedoman pada petunjuk informan awal. Untuk memberikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan data hasil wawancara, hasil observasi dan dokumen yang ada.

Dengan menggunakan model proses untuk menggambarkan rangkaian kegiatan politik dalam proses perumusan yang antara lain mempunyai variabel : Identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penilaian kebijakan dan untuk memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada, maka peneliti mencoba untuk melakukan elaborasi teori dengan model elite-massa. Sehingga ada beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, pertama : peran pemerintah dominan dalam proses kebijakan, karena pemerintah lebih memilih untuk bertindak sendiri dan tidak memperhatikan pendapat dan tuntutan pedagang. Kedua : peran pedagang dalam proses perumusan kebijakan dapat dikatakan cukup tinggi antara lain seringnya mereka mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan dan berusaha untuk memberikan jalan keluar atas kebijakan yang dibuat Bupati. Namun karena tidak adanya saluran-saluran resmi yang dapat menampung dan menyalurkan gagasan mereka, sehingga tidak memberikan pengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang akhirnya ditetapkan tersebut. Maka keputusan yang dibuat Bupati tersebut lebih bersifat *top-down*.